



**DETERMINAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mayong Dan
Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh
Firda Khoirun Nisya
7101413409

UNNES

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



NIP 197510101999031001

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si

NIP 196801021992031002

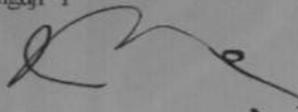
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *18 September 2017*

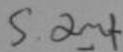
Penguji 1



Amir Mahmud, S. Pd., M.Si

NIP. 197212151998021001

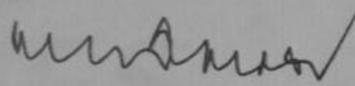
Penguji 2



Sandy Arief, S.Pd., M.Sc.

NIP. 198307052005011002

Penguji 3



Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si

NIP. 197510101999031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Wahyono, M.M.

NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firda Khoirun Nisya

NIM : 7101413409

Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 06 Januari 1996

Alamat : Desa Pringtulis RT 03 RW 04

Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 23 Agustus 2017

Mahasiswa Praktikan,



Firda Khoirun Nisya

7101413409

Firda Khoirun Nisya

NIM. 7101413409

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ◆ **Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri (Q.S. Al-Ankabut [29]: 6)**
- ◆ **Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga (H.R Muslim)**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Ibuku tercinta, Sunaryo dan Nor Khayati., yang selalu menyayangi, mendoakan, memberikan semangat, dan dukungan tiada henti.
2. Kakaku tersayang Lailya Anis Sa'adah
3. Teman-teman Pendidikam Akuntansi C 2013
4. Almamater, Universitas Negeri Semarang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan inayah-Nya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Determinan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara)” dengan baik.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, motivasi dan do'a berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1 Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
- 2 Dr. Wahyono, M. M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan pelaksanaan penelitian.
- 3 Dr. Ade Rustiana, M. Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan pelaksanaan penelitian.

- 4 Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
- 5 Amir Mahmud, S.Pd, M.Si dan Sandy Arief, S.Pd, M.Sc., Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan pada skripsi ini.
- 6 Dra. Margunani, Dosen Wali Pendidikan Akuntansi C 2013 yang telah mendampingi penulis mulai dari awal hingga akhir studi di Universitas Negeri Semarang.
- 7 Seluruh Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Ekonomi yang telah berbagi banyak ilmu sebagai bekal penelitian skripsi dan bekal untuk masa depan.
- 8 Pemerintah desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung yang telah bersedia memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
- 9 Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Semarang, 23 Agustus 2017

UNNFS
UNIVERSITAS NEGE

Mahasiswa Praktikan.



Firda Khoirun Nisya
7101413409

Firda Khoirun Nisya
NIM. 7101413409

SARI

Khoirun Nisya, Firda. 2017. *“Determinan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara)”* Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si.

Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Penyajian Laporan Keuangan, Persepsi Pemahaman Tupoksi, Komitmen Manajemen Puncak, Akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan teknis, penyajian laporan keuangan desa, persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa, dan komitmen manajemen puncak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Populasi penelitian ini adalah pengelola keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, sedangkan unit analisisnya adalah pemerintah desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik populasi yaitu mengambil semua sampel yang menjadi populasi. Metode pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner). Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda dengan program SPSS versi 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial bimbingan teknis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, penyajian laporan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan komitmen manajemen puncak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Saran dalam penelitian ini bagi pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk memaksimalkan bimbingan teknis yang diselenggarakannya tidak hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitasnya, pemerintah desa membuat website agar masyarakat pengguna laporan keuangan lebih mudah mengakses laporan keuangan desa, pemerintah desa membuat papan uraian tugas pokok dan fungsi seluruh jabatan supaya aparat desa selalu mengingat dan memahami tupoksinya dengan lebih baik, dan kepala desa sebagai manajemen puncak agar menjaga dan mempertahankan serta meningkatkan komitmen manajemen yang dimilikinya. Saran bagi penulis selanjutnya agar dapat menambah jumlah sampel dan populasi serta menggunakan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

ABSTRACT

Khoirun Nisya, Firda. 2017. "The Accountability Determinant of Village Financial Management (study case on Village Government in Mayong and Kedung Sub-district, Jepara Regency)" Final Project. Department of Economic Education. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si.

Keywords: Technical Guidance, Finance Report Presentation, Perception to the Tupoksi Understanding, Peak Management Commitment, Accountability

This study aimed to determine the influence of technical guidance, presentation of village financial statements, perceptions of basic duties and functions (*tupoksi*), and peak management commitment toward the accountability of village financial management at village government in Mayong and Kedung Sub-district, Jepara

This research used the management of village finance in Mayong and Kedung Sub-district, Jepara as the population, while the analysis unit was the village government. The sampling technique used was population technique in which all population was included as the samples. The data collection method used was questionnaire. The data then was analyzed using descriptive analysis and multiple regressions utilized by SPSS 21.0.

The results showed that partially technical guidance did not give an affect on the accountability of village financial management, the village financial report presentation gave positive and significant impact on the accountability of village financial management, perception of basic duties and functions (*tupoksi*) in village government gave a positive and significant impact on financial management accountability Village, and peak management commitment gave a positive and significant impact on accountability of village financial management.

The suggestions for the provincial and local governments are to maximize the quantity and quality of technical guidance, create a village government website to ease the village people in accessing village financial management, make a description of basic duties and function so that the village officials always remember and understand their duties, maintain and enhance the management commitment. Besides, the suggestions for the next writers are to use other variables and increase the number of samples and population.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	17
1.3. Cakupan Masalah	18
1.4. Perumusan Masalah	18
1.5. Tujuan Penelitian	19
1.6. Kegunaan Penelitian	20
1.7. Orisinalitas Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Teori Utama (Grand Teory)	23

2.1.1. Teori Stewardship (<i>Stewardship Theory</i>)	23
2.1.2. Teori Pendidikan dan Pelatihan	25
2.1.3. Teori Kompetensi	27
2.2. Kajian Variabel Penelitian	28
2.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	28
2.2.1.1. Pengertian Akuntabilitas	28
2.2.1.2. Prinsip-prinsip dan Macam Akuntabilitas	30
2.2.1.3. Dimensi dan Jenis-jenis Akuntabilitas	31
2.2.1.4. Indikator Akuntabilitas	32
2.2.1.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	34
2.2.2. Bimbingan Teknis	34
2.2.2.1. Pengertian Bimbingan Teknis	34
2.2.2.2. Manfaat Bimbingan Teknis	35
2.2.2.3. Materi Bimbingan Teknis	38
2.2.2.4. Prinsip Bimbingan Teknis	40
2.2.2.5. Indikator Bimbingan Teknis	41
2.2.3. Penyajian Laporan Keuangan	41
2.2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan	41
2.2.3.2. Tujuan dan Manfaat Penyajian Laporan Keuangan	42
2.2.3.3. Karakteristik Penyajian Laporan Keuangan	43
2.2.3.4. Indikator Penyajian Laporan Keuangan	45
2.2.3.5. Laporan Keuangan	46

2.2.4. Persepsi Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi	
dalam Pemerintah Desa.....	49
2.2.4.1. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).....	49
2.2.4.2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).....	50
2.2.4.3. Indikator Persepsi Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Pemerintah Desa	52
2.2.5. Komitmen Manajemen Puncak	52
2.2.5.1. Pengertian Komitmen Manajemen	52
2.2.5.2. Komponen Komitmen Manajemen.....	54
2.2.5.3. Indikator Komitmen Manajemen.....	55
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu	56
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis	60
2.4.1. Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	60
2.4.2. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	61
2.4.3. Pengaruh Persepsi Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	62
2.4.4. Pengaruh Komitmen Manajemen Puncak Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	63
2.5. Hipotesis Penelitian	66
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	67

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	67
3.2.1. Populasi.....	67
3.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	68
3.3. Variabel Penelitian	68
3.3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	68
3.3.2. Bimbingan Teknis	68
3.3.3. Penyajian Laporan Keuangan Desa.....	69
3.3.4. Persepsi Pemahaman Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) dalam Pemerintah Desa	69
3.3.5. Komitmen Manajemen Puncak	70
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	71
3.5. Uji Instrumen Penelitian	72
3.5.1. Uji Validitas Instrumen	72
3.5.2. Uji Reliabiitas Instrumen.....	73
3.6. Teknis Analisis Data.....	74
3.6.1. Teknis Analisis Statistik Deskriptif	74
3.6.2. Analisis Regresi Berganda	78
3.6.3. Uji Normalitas	79
3.6.4. Uji Linearitas	80
3.6.5. Uji Asumsi Klasik	80
3.6.5.1. Uji Multikoloniaritas	80
3.6.5.2. Uji Heterokedastisitas	81
3.6.6. Uji Kelayakan Model	81

3.6.6.1.Uji F	81
3.6.6.2.Uji Parsial (Uji t)	82
3.6.6.3.Koefisien Determinasi	83
3.6.3.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)	83
3.6.3.3.2 Koefisien Determinasi (r^2)	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	84
4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	84
4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif	85
4.1.2.1.Statistik Deskriptif Responden	87
4.1.2.2.Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	87
4.1.3. Analisis Regresi Berganda.....	95
4.1.4. Uji Normalitas	97
4.1.5. Uji Asumsi Klasik	98
4.1.5.1.Uji Linearitas	98
4.1.5.2.Uji Multikoloniaritas	101
4.1.5.3.Uji Heterokedastisitas	102
4.1.6. Uji Kelayakan Model	104
4.1.6.1.Uji F	104
4.1.6.2.Uji Parsial (Uji-t)	105
4.1.6.3.Koefisien Determinasi	108
4.1.6.3.1. Koefisien Determinasi (R^2)	108
4.1.6.3.2. Koefisien Determinasi (r^2)	109

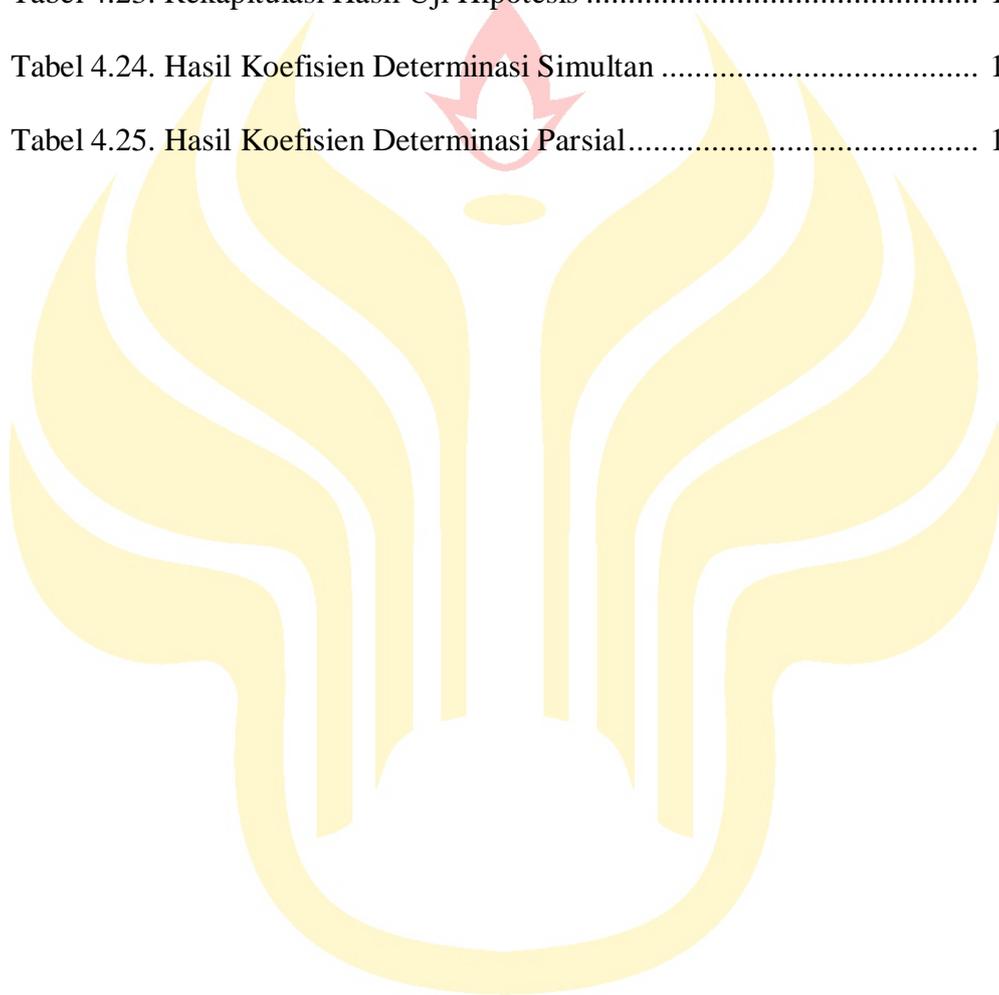
4.2. Pembahasan	110
4.2.1. Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	110
4.2.2. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	113
4.2.3. Pengaruh Persepsi Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	115
4.2.4. Pengaruh Komitmen Manajemen Puncak Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	119
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	123
5.2. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	56
Tabel 3.1. Jumlah Desa yang Menjadi Sampel Penelitian	67
Tabel 3.2. Penentuan Jumlah Sampel Penelitian	68
Tabel 3.3. Kategori Penskoran Skala Likert	71
Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Uji Instrumen Bimbingan Teknis	73
Tabel 3.5. Hasil Uji Reliabilitas Uji Instrumen Bimbingan Teknis	74
Tabel 3.6. Jenjang Kriteria Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	75
Tabel 3.7. Jenjang Kriteria Variabel Bimbingan Teknis	76
Tabel 3.8. Jenjang Kriteria Variabel Penyajian Laporan Keuangan Desa	77
Tabel 3.9. Jenjang Kriteria Variabel Persepsi Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Pemerintah Desa	77
Tabel 3.10. Jenjang Kriteria Variabel Komitmen Manajemen Puncak	78
Tabel 4.1. Daftar Desa yang Menjadi Sampel Penelitian	86
Tabel 4.2. Deskripsi Karakteristik Responden	87
Tabel 4.3. Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	88
Tabel 4.4. Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	89
Tabel 4.5. Statistik Deskriptif Variabel Bimbingan Teknis	90
Tabel 4.6. Analisis Deskriptif Variabel Bimbingan Teknis	90

Tabel 4.7. Statistik Deskriptif Variabel Penyajian Laporan	
Keuangan Desa.....	91
Tabel 4.8. Analisis Deskriptif Variabel Penyajian Laporan	
Keuangan Desa.....	92
Tabel 4.9. Statistik Deskriptif Variabel Persepsi Pemahaman Tugas	
Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Pemerintah Desa.....	93
Tabel 4.10. Analisis Deskriptif Variabel Persepsi Pemahaman Tugas	
Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Pemerintah Desa.....	93
Tabel 4.11. Statistik Deskriptif Variabel Komitmen Manajemen Puncak.....	94
Tabel 4.12. Analisis Deskriptif Variabel Komitmen Manajemen Puncak.....	95
Tabel 4.13. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	98
Tabel 4.14. Hasil Pengujian Normalitas	98
Tabel 4.15. Hasil Uji Linearitas Bimbingan Teknis dengan Akuntabilitas	
Pengelolaan Keuangan Desa	99
Tabel 4.16. Hasil Uji Linearitas Penyajian Laporan Keuangan Desa	
dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	99
Tabel 4.17. Hasil Uji Linearitas Persepsi Pemahaman Tugas Pokok	
dan Fungsi (Tupoksi) dalam Pemerintah Desa dengan	
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100
Tabel 4.18. Hasil Uji Linearitas Komitmen Manajemen Puncak	
dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	101
Tabel 4.19. Hasil Uji Multikolinieritas	102
Tabel 4.20. Hasil Uji Heterkoskedastisitas (Metode <i>Glejser</i>).....	103

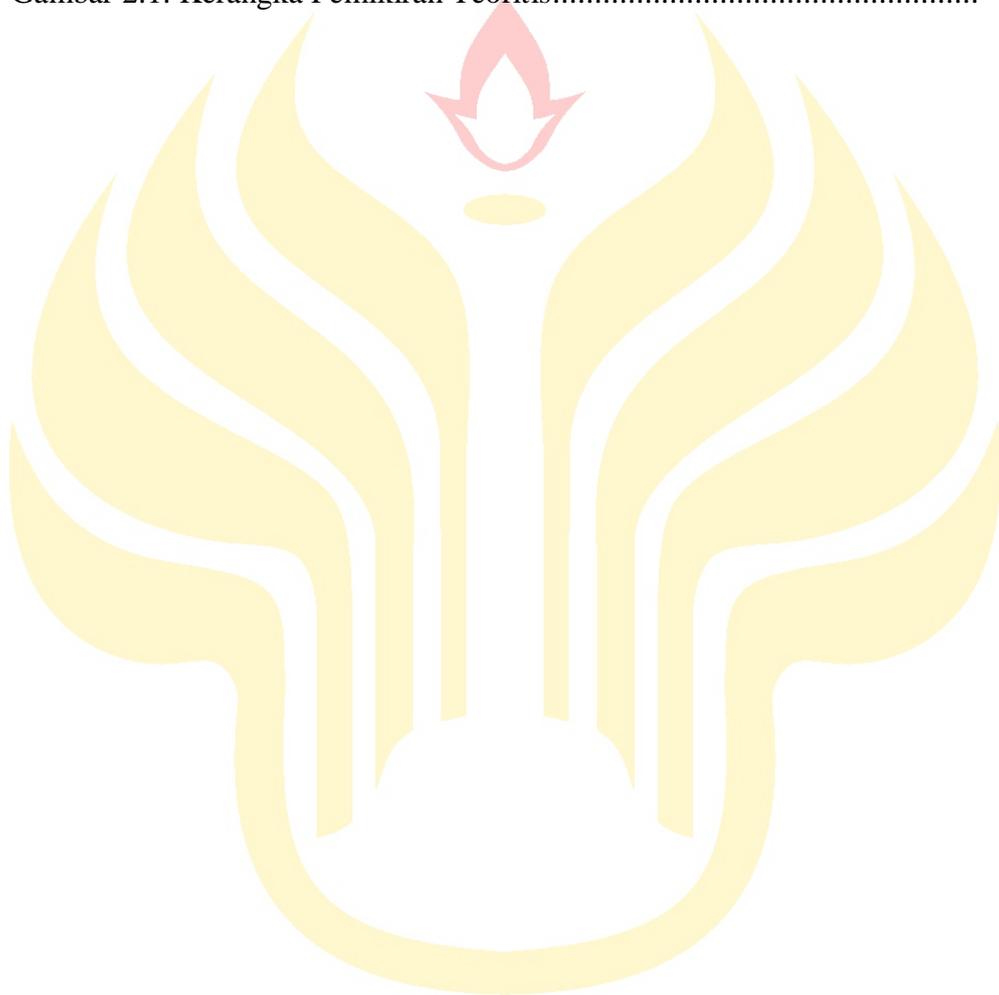
Tabel 4.21. Hasil Uji F.....	104
Tabel 4.22. Hasil Uji T.....	105
Tabel 4.23. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis	107
Tabel 4.24. Hasil Koefisien Determinasi Simultan	108
Tabel 4.25. Hasil Koefisien Determinasi Parsial.....	109



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis..... 65



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Uji Coba Instrumen Penelitian	132
Lampiran 2 Uji Coba Instrumen Penelitian.....	134
Lampiran 3 Daftar Desa yang Menjadi Sampel Uji Coba Instrumen.....	141
Lampiran 4 Tabulasi Data Uji Coba Instrumen Penelitian	142
Lampiran 5 Uji Validitas dan Reliabilitas	143
Lampiran 6 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	145
Lampiran 7 Instrumen Penelitian	147
Lampiran 8 Daftar Desa yang Menjadi Sampel Penelitian	154
Lampiran 9 Tabulasi Data Hasil Penelitian	155
Lampiran 10 Analisis Deskriptif	160
Lampiran 11 Hasil Uji Normalitas	168
Lampiran 12 Hasil Uji Asumsi Klasik	169
Lampiran 13 Hasil Uji Kelayakan Model	172
Lampiran 14 Surat	174

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan landasan utama dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai unit organisasi pemerintahan terkecil, pemerintah desa telah dekat dengan masyarakat yang menjadi subjek pembangunan. Oleh karena itu untuk memperlancar laju pembangunan, pada tahun 2015 desa mulai menerima Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari pemerintah pusat tanpa melewati perantara. Kucuran dana ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan desa sendiri telah diakui baik secara yuridis maupun formal. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbicara mengenai desa, yang terlintas di pikiran banyak orang adalah kawasan yang tertinggal, pelosok dan serba tradisional. Namun kini desa telah berkembang menjadi wilayah yang mandiri, berkembang, dan kuat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Desa telah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri dengan

potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing wilayahnya guna mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu wewenangnya yaitu pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Desa yang memberikan amanat berkaitan dengan tujuan pengaturan desa. Amanat Undang-undang Desa yang bersifat mandatory menitikberatkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan aset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan desa dan perangkat desa.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Desa, maka pemerintah desa mempunyai pedoman dan tidak mengalami kebingungan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar selama penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut pemerintah desa akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan keuangannya karena sudah terdapat aturan yang jelas dan pasti. Setiap tahap pengelolaan keuangan yang harus dilakukan akan terasa lebih ringan dan terarah sehingga prinsip akuntabilitas yang dituntut oleh banyak pihak akan terwujud.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah (APBN dan APBD) yang jumlah anggaran yang tersedia berlipat dari tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan atas dana tersebut yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan, serta korupsi (KPK, 2015).

Menurut data dari (www.kedesa.id), menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun penyaluran dana desa terus meningkat. Berdasarkan data dalam laman tersebut, APBN-P 2016 telah dialokasikan untuk dana desa sebesar ± Rp 46,96, bahkan rencana APBN-P tahun 2017 naik 3 kali lipat yaitu sebesar 60 triliun dibandingkan di tahun 2015 yang hanya 20 triliun. Jumlah tersebut akan disalurkan kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-undang Desa pasal 72, desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Menanggapi tentang hal diatas, saat ini isu penting dalam pengelolaan keuangan negara (pengelolaan APBN maupun pengelolaan APBD) yakni terkait bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah (Dubnick, et al. dalam Setyoko, 2010: 14). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN dan BPKP: 2000). Saat ini merupakan era demokrasi, di mana masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan, sehingga kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi (Hupe & Hill, et al. dalam

Setyoko: 2010). Dengan adanya tuntutan ini maka akuntabilitas pemerintah desa yang mengelola keuangan desa menjadi sorotan utama, terlebih saat desa menerima dana desa yang bersumber dari APBDes.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka pemerintah desa akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah sehingga akan bekerja lebih bertanggungjawab dan disiplin, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran lebih partisipatif dan pro rakyat, mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di samping itu dengan ditingkatkan transparansi yang akan mendukung akuntabilitas keuangan maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan akan terwujud tata pemerintahan desa yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*).

Dengan terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dan bersih yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa salah satu tujuan dari dikucurkannya dana desa telah tercapai. Salah satu tujuannya yaitu dengan berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu juga dapat menambah pendapatan yang dimiliki masing-masing desa yang merupakan hasil dari pengoptimalisasian kekayaan dan aset yang dimiliki desa guna pembangunan desa itu sendiri. Dengan pembangunan dari desa-desa yang ada di Indonesia sebagai salah satu hasil dari perwujudan akuntabilitas, maka proses pembangunan di tingkat daerah maupun pusat akan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Besar dana yang diterima desa memberikan tanggungjawab yang besar pula untuk pemerintah desa dalam pengelolaannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Undang-undang Desa telah memberikan kesempatan yang besar kepada desa untuk mengatur serta mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki secara mandiri. Salah satunya yaitu pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BPKP, 2015). Hal tersebut mempertegas fakta bahwa pertanggungjawaban keuangan desa oleh pengelola keuangan desa menjadi tuntutan yang pasti dari masyarakat.

Dalam masa transisi implementasi Undang-undang Desa, terdapat dua masalah utama yang menjadi kendala. Pertama adalah terkait kapasitas administrasi dan tata kelola birokrasi di desa yang masih belum terlatih, sehingga harus diselesaikan dan segera dibereskan. Kedua adalah persoalan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran yang cukup besar. Alasannya, untuk tataran pemerintah kabupaten/kota persoalan akuntabilitas belum juga terselesaikan. Dalam hal ini pemerintah ditingkatan kabupaten/kota hanya bertanggungjawab secara prosedur bukan substantif (Mulyono, 2014).

Kendala lain yang masih sulit untuk diselesaikan adalah mengenai pertanggungjawaban juga masih terdapat beberapa masalah terutama berkaitan dengan waktu pelaporan. Seperti peraturan mengenai Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan

Januari tahun berikutnya. Namun yang terjadi di lapangan, banyak pemerintah desa yang menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes pada bulan Februari bahkan sampai bulan Maret.

Menurut Eks. Faskeu PNPMPD (2015) di lapangan masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang belum terselesaikan, yakni (1) belum tersiapkannya perangkat teknis terkait dengan pengelolaan keuangan desa, (2) belum dipahaminya secara mendalam regulasi/aturan pendukung terkait dengan teknis pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah dan pelaku di tingkat desa, (3) masih lemahnya daya dukung (SDM) dan kapasitas teknis perangkat serta pelaku di tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku, dan (4) belum tersiapkannya sistem akuntansi standar di tingkat desa yang akan digunakan untuk menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga memiliki potensi penyalahgunaan yang diakibatkan oleh beberapa hal, yang antara lain adalah belum kuatnya mekanisme koordinasi dan pengawasan, belum jelasnya teknis sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa, dan juga belum adanya acuan yang jelas mengenai sistem pengadaan barang/jasa dan pengelolaan aset desa.

Dengan berbagai problematika yang disebutkan di atas maka cita-cita untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak dapat dengan mudah dilaksanakan. Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa membutuhkan banyak sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat

diandalkan. Di lain sisi, banyak pihak menganggap kemampuan para aparatur desa di daerah yang masih rendah dan belum siap justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau. Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparatur desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015).

Berdasarkan Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan di lima sampel pada tahun 2015, yaitu Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil bahwa akuntabilitas keuangan di desa masih rendah. Dari hasil laporan kajian KPK di atas, diketahui Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dalam hal ini pengelola keuangan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan sampai pada proses pertanggungjawaban memiliki peran yang amat penting.

Beberapa desa ditemukan telah melakukan kecurangan-kecurangan terhadap dana yang harusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat dan desa, tetapi dimasukkan ke kantongnya sendiri. Seperti yang terjadi di beberapa desa Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari informasi yang dihimpun dari (Detik.com pada 6/12/2016), bahwa tim saber pungli Polda Jatim mengamankan empat orang tersangka dimana keempat orang tersebut adalah

perangkat desa beserta istri kepala desa. Keempatnya melakukan manipulasi pada pencairan dana, yang seharusnya desa menerima alokasi sebesar Rp 132.847.500 tetapi hanya menerima Rp 78.197.500. Sisanya dipotong dengan alasan untuk membayar pajak, membuat papan nama, pelatihan, dll.

Selain itu, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa juga masih buruk. Dikutip dari (Tribunnews.com) KPK menemukan bahwa Siskuedes, yaitu aplikasi sederhana untuk pertanggungjawaban laporan keuangan sampai pada kuartal pertama baru digunakan 30%. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyebutkan bahwa Kemendes telah menerima 600 laporan dan KPK menerima 300 laporan terkait dugaan penyelewengan dana desa. Menurutnya, buruknya pengelolaan dana desa disebabkan oleh buruknya sistem pengawasan karena peran daerah dalam melakukan pengawasan belum berjalan maksimal.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa. Menurut Rahmi, dkk. (2015) faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu: kemampuan sumberdaya aparatur, terbatasnya dana Alokasi Dana Desa (ADD), kurang disiplinnya penerima Alokasi Dana Desa (ADD) pada proses pelaporan, komunikasi, swadaya masyarakat, dan sarana prasarana.

Menurut penelitian yang dilakukan Zuhriyah (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah bimbingan teknis, pemahaman mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa, pemahaman bimbingan teknis dan pemahaman mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sudah sangat tinggi, namun banyak aparat desa yang merasa masih membutuhkan bimbingan teknis. Penelitian serupa dilakukan oleh Widarini (2016) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah bimbingan teknis dan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan pemahaman mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Rahmawati (2016) faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah bimbingan teknis, pemahaman mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan desa dan pemahaman tugas pokok dan fungsi. Hampir serupa dengan itu, Khusniyatun (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, bimbingan teknis dan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi. Sedangkan menurut Wardana (2016) menyebutkan bahwa faktor penyajian laporan keuangan desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal desa merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Faktor-faktor yang telah diuraikan di atas menjadi dasar bagi peneliti dalam memberikan dugaan terkait penyebab akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang rendah. Sebelum melakukan dugaan, terlebih dahulu peneliti mengumpulkan

informasi mengenai fenomena terkait pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung. Dikutip dari (Koran Muria), salah seorang pendamping desa mengungkapkan bahwa pemerintah desa masih menemui kendala dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Selain itu, kendala lainnya yaitu banyak pengelola keuangan desa yang belum memahami penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Fenomena yang ada di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara masih ditemukan desa-desa yang mengalami keterlambatan dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 padahal waktu yang tersisa hampir berakhir sehingga berdampak pada kemungkinan hangusnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 pada dua kecamatan tersebut. Dari informasi yang dikutip dari (Koran Muria) pada 30 November 2015, dijelaskan bahwa beberapa desa di kecamatan tersebut belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) baik untuk tahap I maupun tahap II. Dengan sisa waktu yang tersisa satu bulan, sulit kemungkinan untuk mencairkan karena jika cair maka akan sulit untuk membiayai program pembangunan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sumber daya manusia pengelola keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai pengelolanya. Upaya dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengembangan SDM sebagai pengelola keuangan desa memerlukan upaya terarah

dan terencana, salah satunya yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Menurut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh *skill* dan pengetahuan. Sedangkan menurut Hamalik dalam Khusniyatun (2016) pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas, penyampaian informasi, latihan keterampilan, pengorganisasian suatu lingkungan belajar yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman, motivasi untuk melaksanakan sendiri kegiatan latihan dan memperbaiki dirinya sendiri sehingga mampu membantu dirinya sendiri. Bimbingan teknis merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu. Bimbingan teknis merupakan kegiatan yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengelola keuangan desa.

Sebelumnya dilakukan beberapa penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa dibutuhkannya bimbingan teknis untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Setyoko (2010) yang berjudul “Akuntabilitas Administrasi Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)”, menyatakan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD), maupun program pembangunan perdesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan. Oleh

karena itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Desa, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dan melakukan pendampingan berupa bimbingan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh Irma (2014) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”, menemukan hal yang sama yaitu bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah penyajian laporan keuangan desa. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan pada gilirannya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2006: 7). Mulyana (2006) menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Jadi dengan adanya

penyajian laporan keuangan daerah yang baik, yang memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Suatu organisasi sektor publik dalam mengelola dana masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 103-104 menyatakan tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, kepala desa juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Selain pertanggungjawaban secara vertikal (kepada Bupati/Walikota), pemerintah desa juga perlu menyampaikan laporan keuangan desa kepada masyarakat luas guna pertanggungjawaban secara horizontal. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan desa akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasution (2009) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara“, menunjukkan hasil bahwa secara parsial penyajian neraca SKPD berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk. (2014) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi

Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung)”, yang menggunakan variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel independen dan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sama halnya dengan aksesibilitas laporan keuangan yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan terwujud apabila masing-masing pemerintah desa mampu berperan optimal dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman akan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa akan berpengaruh langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketika aparat desa dapat memahami dengan baik dan jelas tiap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari pekerjaannya, maka ia akan mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal serta mengurangi tingkat kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu pengelolaan keuangan desa akan berjalan efektif dan efisien seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab III mengenai Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, pemahaman akan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjadikan aparat desa mengerti dengan baik akan tugasnya dalam memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilakukan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sebelumnya Widarini (2016) telah melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Pamong Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”,

yang menemukan hasil bahwa pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Peneliti menambahkan variabel baru yaitu komitmen manajemen puncak. Komitmen yang dimiliki manajemen puncak selaku pimpinan menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu pemerintahan desa. Guna menciptakan organisasi dengan kinerja yang tinggi diperlukan komitmen manajemen yang tinggi dari pimpinan dan stafnya untuk hasil yang diinginkan (GAO: 2001). Khikmah (2005) mengemukakan bahwa komitmen manajemen atau komitmen organisasi sebagai nilai personal, yang kadang-kadang mengacu sebagai sikap loyal pada perusahaan. Pendapat lain dikemukakan oleh Sheth dan Mittal (2004) yang mendefinisikan komitmen sebagai hasrat atau keinginan kuat untuk mempertahankan dan melanjutkan relasi yang dipandang penting dan bernilai jangka panjang. Komitmen biasanya tercermin dalam perilaku kooperatif dan tindakan aktif untuk tetap mempertahankan relasi yang telah terbina. Dalam konteks pemerintah desa, komitmen merupakan hal yang harus dimiliki oleh individu karena dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan pertanggungjawaban yang berkualitas tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen yang kuat dari para pengelola terutama oleh pimpinan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Adha, dkk. (2014) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai)”. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa komitmen pimpinan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.

Dalam konteks pengelola keuangan desa, kepala desa selaku manajemen puncak dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan instansi yang telah ditentukan dari awal. Dengan komitmen yang dimiliki maka segala keputusan dan tindakan yang diambil oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan akan terarah dan tepat sasaran. Selain itu juga komitmen yang kuat sangat dibutuhkan oleh kepala desa sebagai pertanggungjawaban terhadap tugasnya dalam memimpin aparat desa sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel.

Berdasarkan *fenomena gap* yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Determinan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dapat ditentukan permasalahan penting yang akan dicari alternatif atau solusi melalui penelitian ini adalah rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa

- 2) Potensi tumpang tindih kewenangan yang mencakup urusan pembinaan dan pembangunan desa serta monitoring dan evaluasi
- 3) Masih rendahnya kemampuan sumberdaya aparatur pengelola keuangan desa karena masih banyak ditemukan masalah dalam pengelolaan keuangan desa
- 4) Kurang disiplinnya pengelola keuangan desa pada proses pelaporan karena masih banyak ditemukan keterlambatan saat proses pelaporan
- 5) Sarana prasarana yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan dana desa
- 6) Belum adanya standar yang pasti dalam penyajian laporan keuangan di tingkat desa
- 7) Kurangnya komitmen organisasi yang dimiliki pengelola keuangan desa
- 8) Aksesibilitas laporan keuangan desa yang kurang bagi masyarakat desa
- 9) Pemahaman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang masih rendah
- 10) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang belum berjalan sistematis dan maksimal.

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan uraian berbagai masalah yang telah peneliti paparkan dalam latar belakang, maka peneliti memberikan cakupan atau batasan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini hanya akan dilaksanakan di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

- 2) Peneliti membatasi variabel-variabel yang akan diteliti yang diduga berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas keuangan desa, yaitu bimbingan teknis, penyajian laporan keuangan desa, persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa dan komitmen manajemen puncak.

1.4 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara faktor bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara?
- 2) Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara faktor penyajian laporan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara?
- 3) Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara faktor persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara?
- 4) Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara faktor komitmen manajemen puncak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui adakah pengaruh positif dan signifikan antara faktor bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
- 2) Untuk mengetahui adakah pengaruh positif dan signifikan antara faktor penyajian laporan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
- 3) Untuk mengetahui adakah pengaruh positif dan signifikan antara faktor persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
- 4) Untuk mengetahui adakah pengaruh positif dan signifikan antara faktor komitmen manajemen puncak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (bimbingan teknis, penyajian laporan keuangan desa, persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa dan

komitmen manajemen puncak) sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam.

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan praktis diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Bagi Instansi Pemerintah Terkait

Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Bagi Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten

Menjadi dasar pertimbangan, evaluasi dan masukan untuk pemerintah agar bisa memberikan penilaian terhadap pengelolaan keuangan desa, serta sebagai dasar dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait penilaian tersebut.

3) Bagi Masyarakat

Menjadi bahan dan sumber informasi bagi masyarakat terkait akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik terutama terkait masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Widarini (2016) dimana variabel X yang digunakan dalam penelitiannya yaitu

pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam pemerintah desa, pemahaman bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dan pemahaman mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian ini menggunakan variabel bimbingan teknis, penyajian laporan keuangan desa, persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa, dan komitmen manajemen puncak. Berbeda dengan penelitian Wardana (2016) dimana variabel X yang digunakan dalam penelitiannya yaitu penyajian laporan keuangan desa, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal sedangkan penelitian ini menggunakan variabel bimbingan teknis, penyajian laporan keuangan desa, persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa, dan komitmen manajemen puncak.

Kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel-variabel yang disusun dalam model penelitian. Peneliti menghadirkan variabel baru yaitu komitmen manajemen puncak sehingga penelitian ini mencakup lima variabel konseptual yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, bimbingan teknis, penyajian laporan keuangan desa, persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa, dan komitmen manajemen puncak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, belum ada peneliti yang melakukan penelitian dengan kombinasi kelima variabel tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Teory)

2.1.1. Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis dalam Raharjo, 2007: 39). Teori *stewardship* menjelaskan manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Lebih jauh Donaldson dan Davis dalam Ikhsan dan Suprpto (2008: 85) menggambarkan bahwa teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih

mementingkan kepentingan *principal* (pemilik). Kondisi ini didasari sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh *steward*. Sikap melayani sebagai suatu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi pemilikan dan penggunaan kekuasaan (*power*). Teori *Stewardship* ini akan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan, pemberdayaan, kemitraan, dan penggunaan kekuasaan dengan benar, maka tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya. *Steward* (pengelola) percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan organisasi dan *principal* (pemilik).

Teori *stewardship* sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), memandang manajemen sebagai *steward* (pelayan/ penerima amanah/ pengelola) akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dipertimbangkan dapat menjelaskan hubungan antar variabel, dengan asumsi bahwa untuk melaksanakan amanah tersebut maka *steward* (pengelola) akan mengalokasikan sumber daya, dana serta strategi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan menyajikan pertanggungjawaban yang diperlukan dengan baik pula. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan sistem akuntansi yang baik merupakan faktor penting guna mendukung *steward* dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawabnya.

Asumsi dari teori ini adalah aparat desa merupakan *steward* (pengelola) keuangan desa. Aparat desa bertindak sebagai *steward* (pihak yang bertanggungjawab) dalam pengelolaan keuangan desa dengan masyarakat sebagai

principal karena berhak untuk menerima pertanggungjawaban. Selain kepada masyarakat, *steward* juga perlu untuk melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah guna pertanggungjawaban vertikal. Aparat desa melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Apabila terjadi benturan antara kepentingan dua pihak (pemerintah desa dan masyarakat) maka pemerintah desa selaku *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana pemerintah desa merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan serta keinginan dan kebutuhan masyarakat karena pemerintah desa (*steward*) lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi, bukan pada tujuan individu.

2.1.2. Teori Pendidikan dan pelatihan

Suatu organisasi akan selalu berusaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pencapaian tujuan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, mutu sumber daya manusianya harus bagus dan salah satu cara peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu melalui program pendidikan dan pelatihan. Pelatihan merupakan proses mengajar karyawan baru atau yang ada sekarang mengenai keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan kebutuhan mereka.

Scott dalam Moekijat (1981:12) merumuskan latihan dalam ilmu pengetahuan tentang tingkah laku manusia adalah suatu kegiatan lini dan staf yang

tujuannya adalah pengembangan pemimpin untuk memperoleh efektivitas pekerjaan perorangan yang lebih besar, hubungan-hubungan antar perorangan dalam organisasi yang baik dan penyesuaian pemimpin yang ditingkatkan kepada suasana dari seluruh lingkungannya. Tujuan latihan dalam ilmu tingkah laku manusia adalah untuk melengkapi para pemimpin dengan pengetahuan dan sikap-sikap bagi kelakuan manusia yang diperlukan untuk memelihara suatu organisasi departemen yang efektif. Menurut Hasibuan (2010) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral pegawai. Dengan kata lain, orang yang akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara berencana cenderung lebih dapat bekerja secara terampil jika dibandingkan dengan pegawai yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan kebutuhan bagi pegawai guna mendapatkan keterampilan, keahlian dan pengetahuan baru guna meningkatkan kualitas kinerjanya. Bimbingan teknis yang diberikan pada aparat desa merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparat desa yang sesuai dengan peraturan yang ada. Program bimbingan teknis menuntun dan mengarahkan perkembangan dari peserta melalui pengetahuan dan keahlian yang diperoleh untuk memenuhi standar tertentu (standar keterampilan, serta pengetahuan yang ditetapkan pemerintah) dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahannya guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.1.3. Teori Kompetensi

Kompetensi didefinisikan oleh Spencer dalam Sudarmanto (2009: 46) sebagai karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Sedangkan menurut Boyatzis dalam Sudarmanto (2009: 46), mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kinerja unggul dan atau efektif di dalam pekerjaan. Pendapat lain disampaikan oleh Dale (2003: 5), yaitu kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan.

Menurut Spencer dalam Sudarmanto (2009: 53), terdapat 5 (lima) komponen-komponen kompetensi, yaitu:

1. “*Knowledge*” adalah pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.
2. “*Skill*” adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.
3. “*Motives*” adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki seseorang yang menyebabkan tindakan. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan atau tujuan tertentu dan menjauh dari yang lain.
4. “*Traits*” adalah karakteristik-karakteristik fisik respon-respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi.

5. “*Self-Concept*” adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana *value* (nilai) yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu.

Asumsi dari teori ini adalah sumber daya manusia menjadi bagian terpenting dari pencapaian tujuan suatu organisasi. Aparat desa memiliki tugas yang amat penting selaku organ negara. Tugas akan berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia yang ada memiliki pengetahuan dan kompetensi yang menunjang secara profesional. Diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, aparat desa dapat bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Selain itu aparat desa diharapkan memahami dengan baik mengenai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidangnya dalam pemerintah desa sehingga mampu bekerja dengan maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki aparat desa maka pengelolaan keuangan desa akan berjalan efisien dan efektif serta pertanggungjawaban yang dilakukan atas penyelenggaraan pemerintahannya juga akan semakin baik sehingga pemerintahan desa yang akuntabel dapat tercapai seperti yang diharapkan.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011). Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Sabeni dan Ghazali dalam Sujarweni (2015: 28). Akutabilitas (*accountability*) menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan “*good governance*” atau pengelolaan pemerintah yang baik, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “*clean goverment*” atau pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya dalam Halim (2007: 254).

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan seorang atau pihak berwenang atas apa yang menjadi kewenangannya. Akuntabilitas menjadi prinsip yang memberikan kepastian kepada khalayak umum bahwa setiap kegiatan dalam suatu instansi maupun perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN dan BPKP, 2000).

2.2.1.2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Macam Akuntabilitas

LAN dan BPKP (2000) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2009: 21) dalam akuntabilitas publik terdiri atas dua macam akuntabilitas diantaranya yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horizontal dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.2.1.3. Dimensi Akuntabilitas dan Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2009:21) terdapat empat (4) dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) adalah akuntabilitas yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi suatu negara. Menurut Halim (2007: 254), akuntabilitas dapat dibagi menjadi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas keuangan merupakan

pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Akuntabilitas manfaat berkaitan dengan efektivitas yang pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil kegiatan pemerintah. Dalam hal ini semua aparat pemerintah dipandang berkemampuan melakukan pencapaian tujuan dan tidak hanya patuh terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur. Bukan hanya *output*, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.

Akuntabilitas prosedural merupakan akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

2.2.1.4.Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Rahmi, Setyowati dan Siswidiyanto: 2015). Dalam penelitian Rahmawati (2015) akuntabilitas dapat diukur melalui; validitas, keandalan

informasi, relevansi, transparansi, dan keakuratan. Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, menurut Kasijan dalam Ramadhani (2011) mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat diukur melalui; pertanggungjawaban dana publik, jenis dan bentuk laporan keuangan, penyajian tepat waktu, pemeriksaan atau audit, dan respon yang cepat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, akuntabilitas keuangan dapat diukur berdasarkan beberapa kriteria yaitu; tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, dan keadilan.

Berdasarkan cara pengukuran yang telah diuraikan di atas, pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini dilakukan melalui penggabungan cara pengukuran yang telah dilakukan oleh Rahmawati (2016) dan Kasijan dalam Ramadhani (2011). Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini yaitu keandalan informasi, relevansi, transparansi, keakuratan, dan tepat waktu.

Peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Rahmawati (2015) dan Kasijan dalam Ramadhani (2011) untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung dikarenakan keenam indikator tersebut memiliki kaitan yang erat dengan kondisi para pengelola keuangan desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

2.2.1.5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa

diantaranya yaitu bimbingan teknis (Wahyuningsih, Zuhriyah, Widarini, Rahmawati dan Khusniyatun: 2016), pemahaman tugas pokok dan fungsi (Wahyuningsih, Zuhriyah, Widarini dan Rahmawati: 2016), pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi (Zuhriyah dan Khusniyatun: 2016).

Terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu; pemahaman mekanisme perencanaan (Wahyuningsih dan Widarini: 2016), pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (Khusniyatun: 2016), pemahaman mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Zuhriyah: 2016), dan pemahaman mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan desa (Rahmawati: 2016).

Pendapat lain disampaikan oleh Wardana (2016) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa adalah; penyajian laporan keuangan desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal desa.

2.2.2. Bimbingan Teknis

2.2.2.1. Pengertian Bimbingan Teknis

Menurut Allenbaugh yang dikutip oleh Susilowati (2010), menyatakan bahwa bimbingan teknis adalah suatu proses kegiatan berlanjut yang memberi tuntunan, arahan, dan memanfaatkan kekuatan yang ada pada seorang sehingga yang bersangkutan menjadi mahir dan terampil untuk mengerjakan sesuatu yang produktif.

Bimbingan teknis (bimtek), merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah

yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam bimbingan teknis terdapat 2 (dua) unsur penting yaitu pendidikan dan pelatihan (Marbun, 2009).

Bimbingan teknis (bintek/bimtek) ialah suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan yang pada umumnya berupa nasehat dan tuntunan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis (Lembaga Kajian Indonesia).

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan teknis (bintek/bimtek) adalah suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan yang pada umumnya berupa nasehat dan tuntutan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.

2.2.2.2. Manfaat Bimbingan Teknis

Werter dan Davis dalam Marbun (2009) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat beberapa manfaat pendidikan dan pelatihan bagi organisasi, individu, dan bagi penumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara berbagai kelompok (kumpulan) manusia dalam suatu organisasi. Manfaat bimbingan teknis bagi organisasi diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena tidak terjadinya pemborosan tetapi kecermatan melaksanakan tugas, kerja sama yang baik antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahkan spesialis, meningkatkan tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh.

- 2) Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa secara teknikal dan intelektual.
- 3) Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, selain itu para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh para manajer.
- 4) Meningkatkan semangat kerja seluruh pegawai dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi.
- 5) Mendorong sikap keterbukaan manajemen, penerapan gaya manajerial (pengurusan) yang partisipatif.
- 6) Memperlancar jalannya komunikasi efektif yang memperlancar proses perumusan kebijakan organisasi dan operasional.
- 7) Penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya ialah rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasi.

Bimbingan teknis juga memberikan manfaat lain, terutama bagi individu yaitu sebagai berikut:

- 1) Menolong para pegawai membuat keputusan dengan lebih baik.
- 2) Meningkatkan kemampuan para pegawai menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya.
- 3) Timbulnya dorongan di dalam diri para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan kinerjanya.
- 4) Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stress, frustasi, dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya diri sendiri.

- 5) Tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual.
- 6) Meningkatkan kepuasan kerja.
- 7) Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang.
- 8) Makin besarnya tekad pegawai untuk lebih mandiri.
- 9) Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru dimasa depan.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari bimbingan teknis yaitu manfaat bagi kelompok kerja, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya proses komunikasi yang efektif.
- 2) Adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan.
- 3) Ketaatan semua pihak terhadap berbagai ketentuan yang bersifat normal, berlaku umum dan ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang maupun yang berlaku khusus di lingkungan suatu organisasi tertentu.
- 4) Terjadinya iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh pegawai.
- 5) Menjadikan organisasi sebagai tempat yang lebih menyenangkan untuk berkarya.

2.2.2.3. Materi Bimbingan Teknis

Ruang lingkup bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa terdiri dari bimbingan teknis umum, bimbingan teknis inti, dan bimbingan teknis penunjang. Bimbingan teknis umum terdiri dari 4 (empat) pokok materi bimbingan yaitu bina suasana, pokok-pokok pengelolaan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bimbingan teknis terkait pokok materi bina suasana terdiri dari pengenalan, membangun motivasi, dan kerjasama kemudian pengungkapan harapan, dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan kelas dan tata tertib latihan dan terakhir yaitu tes penajakan/ *pre-test*. Materi pokok-pokok pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa hal yaitu: dasar hukum/regulasi pengelolaan keuangan desa, pengertian keuangan dan pengelolaan keuangan desa, kemudian azas pengelolaan keuangan desa, dan cakupan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Bimbingan teknis terkait materi pengelola keuangan desa biasanya terdiri dari 2 (dua) hal yakni unsur pengelola keuangan desa dan kewenangan serta tanggung jawab pengelola. Materi pokok yang terakhir dalam bimbingan teknis yaitu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terdiri dari komponen APBDes dan mengisi form APBDes.

Bimbingan teknis inti terdiri dari 4 (empat) pokok materi bimbingan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan simulasi, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Materi perencanaan terdiri dari 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan APBDes
- 2) Evaluasi rancangan APBDes
- 3) Penetapan rancangan APBDes

Bimbingan teknis inti untuk materi pelaksanaan dan simulasi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pokok-pokok pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

- 2) Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Pembantu Kegiatan, pengadaan Barang dan Jasa, perubahan APBDes.
- 3) Simulasi soal transaksi keuangan dan analisa transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH).
- 4) Kelengkapan bukti-bukti transaksi (nota, kwitansi, bukti pembayaran, pengarsipan & penggolongan bukti transaksi).

Bimbingan teknis inti terkait materi penatausahaan terdiri dari beberapa hal diantaranya; (1) pengertian dan cakupan kegiatan penatausahaan, dan (2) buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Materi lainnya terkait pelaporan dan pertanggungjawaban terdiri dari beberapa hal diantaranya yakni; (1) pengertian, prinsip, tujuan, dan jenis pelaporan, (2) ketentuan dan tata cara pelaporan, (3) tugas dan kewajiban pengelola, dan (4) laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban.

Selanjutnya yaitu bimbingan teknis penunjang terdiri dari 2 (dua) pokok materi bimbingan yaitu pemeriksaan keuangan dan rencana aksi. Materi bimbingan pemeriksaan keuangan terdiri dari beberapa hal yakni; pengertian dan jenis audit, audit oleh auditor negara, dan audit partisipatif sedangkan untuk materi bimbingan rencana aksi terdiri dari penilaian kesenjangan, aspek-aspek pokok penyusunan rencana aksi, dan menyusun rencana aksi.

2.2.2.4.Prinsip Bimbingan Teknis

Dalam bimbingan teknis yang diberikan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Menurut penelitian Susilowati (2010) prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menekankan pada pekerjaan bukan pribadi, berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan bukan pada keberhasilan atau kegagalan yang dibimbing.
2. Saling mengormati, menghargai nilai individu dan haknya untuk menjadi individu.
3. Dimulai dari tingkat kinerja yang dibimbing saat ini sebagai data dasar.
4. Sebagai proses berlanjut yang partisipatif.
5. Bimbingan teknis tidak hanya oleh atasan langsung, tetapi juga pimpinan puncak.
6. Bimbingan yang efektif membuat pembimbing dengan yang dibimbing memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar terhadap tugas dan pekerjaannya serta meningkatkan hubungan kerja dan hubungan antar manusia diantara keduanya.
7. Hasil bimbingan teknis menimbulkan motivasi yang kuat untuk mewujudkan kinerja pada tingkat yang optimal.

2.2.2.5.Indikator Bimbingan Teknis

Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan maka tentunya bimbingan teknis telah menjadi kebutuhan dasar untuk

individu maupun instansi. Indikator bimbingan teknis menurut penelitian Zuhriyah (2016) adalah sebagai berikut:

- 1) Bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi.
- 2) Pembinaan dan/atau pendampingan pengelolaan keuangan desa.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator untuk variabel bimbingan teknis dengan merujuk pada penelitian Zuhriyah (2016). Indikator tersebut adalah:

- 1) Bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi.
- 2) Pembinaan dan/atau pendampingan pengelolaan keuangan desa.

2.2.3. Penyajian laporan keuangan desa

2.2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan desa (*Financial Statement Presentation*) merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu siklus akuntansi setelah proses pengakuan (*recognition*) dan pengukuran (*measurement*) transaksi, kejadian, dan saldo (*balances*). Suatu entitas menyiapkan serta menyajikan laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas untuk memenuhi tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri yaitu menyediakan informasi terutama yang terkait dengan informasi keuangan kepada pengguna (*users/ stakeholders*).

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

2.2.3.2. Tujuan dan Manfaat Penyajian Laporan Keuangan Desa

Suatu instansi dalam membuat laporan keuangan pasti mempunyai tujuan. Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan untuk 2 (dua) hal yakni akuntabilitas dan manajemen. Akuntabilitas yakni untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Manajemen yakni untuk membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh *asset*, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Nordiawan (2006: 36), tujuan penyajian laporan keuangan desa yakni menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan berbagai hal diantaranya yaitu :

- 1) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan.
- 3) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas
- 4) Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.

6) Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Menurut Diamond dalam Peggy (2013) informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
- 2) Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- 3) Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
- 4) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

2.2.3.3. Karakteristik Penyajian Laporan Keuangan Desa

Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Terdapat beberapa karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, sekaligus digunakan sebagai indikator yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), tepat waktu, dan lengkap. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) karena informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) karena informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu. Tepat waktu dalam penyajiannya dan lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan (netral), menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi dalam laporan keuangan netral artinya diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu. Penyajian dilakukan secara jujur dengan asumsi bahwa informasi dalam laporan keuangan menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan untuk disajikan. Dapat diverifikasi dengan asumsi bahwa informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

laporan keuangan dikatakan dapat dibandingkan apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Terakhir yakni laporan keuangan dapat dipahami, dengan artian bahwa informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2.3.4.Indikator Penyajian laporan keuangan desa

Menurut Wahida (2015) indikator yang terkandung dalam penyajian laporan keuangan daerah yang dapat diukur melalui: (1) laporan keuangan disusun secara lengkap, (2) laporan keuangan diselesaikan tepat waktu, (3) laporan keuangan memiliki informasi untuk mengoreksi keuangan masa lalu, (4) laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat memprediksi masa depan, (5) informasi yang disajikan menggambarkan transaksi secara jujur, (6) laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh, (7) informasi yang dimuat dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, (8) laporan keuangan dijadikan sesuai tolok ukur untuk tahun berikutnya.

Berbeda dengan itu, menurut PP No. 71 Tahun 2010 indikator penyajian laporan keuangan daerah dapat diukur melalui 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan cara pengukuran yang telah diuraikan di atas, pengukuran variabel penyajian laporan keuangan desa dalam penelitian ini mengacu pada cara pengukuran menurut PP No. 71 Tahun 2010. Adapun cara pengukuran (indikator) tersebut yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan PP No. 71 Tahun 2010 untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dikarenakan keempat indikator tersebut

yang tepat digunakan untuk menggambarkan penyajian laporan keuangan desa di pemerintahan desa dan sering digunakan untuk mengukur penyajian laporan keuangan desa.

2.2.3.5. Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. BPKP (2015) menyatakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa yakni laporan realisasi pelaksanaan APBDes, pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan realisasi penggunaan dana desa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I (satu) dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja

dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan (2) dua kali yaitu semester I (satu) dan semester II (dua). Untuk semester I (satu) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester II (dua) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disertai dengan lampiran yang terdiri dari beberapa hal yakni; (1) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, (2) format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, (3) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Menurut PP No.43 Tahun 2014 pasal 51, laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2.2.4. Persepsi Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

2.2.4.1. Pengertian Persepsi Pemahaman Tugas dan Fungsi (Tupoksi)

Menurut Suranto (2010: 107) persepsi merupakan proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/ hubungan dengan dunia sekelilingnya. Young (2010) yang mengatakan persepsi adalah aktivitas mengindra, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan pengindraan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada dilingkungannya. Sensasi - sensasi dari lingkungan akan

diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan, dan lain-lain.

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Fajri dan Senja, 2008). Pendapat lain disampaikan oleh Yulaelawati (2007:72) mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan untuk memahami materi/bahan. Proses pemahaman terjadi karena adanya kemampuan menjabarkan suatu materi/bahan ke materi/bahan lain. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Hoetomo, 2005).

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi (Rivani, 2012). Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan (Kementerian Keuangan: 2014). Tupoksi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Himawan, 2004).

Berdasarkan beberapa definisi mengenai tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi adalah pendapat mengenai apa yang dipahami dari pekerjaan atau kegiatan yang harus dan

wajib dilakukan seorang anggota organisasi atau pegawai sebagai tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

2.2.4.2.Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi)

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab III pasal 3 sampai dengan pasal 7. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada aparat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dan Bendahara Desa sebagai salah satu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- 2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada aparat desa.

Sama halnya dengan kepala desa, bendahara desa juga mempunyai tugas dan tanggung jawab tersendiri. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar
- 2) Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya
- 3) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

2.2.4.3. Indikator Persepsi Pemahaman Tupoksi Dalam Pemerintah Desa

Indikator pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menurut Wahyuningsih (2016) dalam penelitiannya yaitu tingkat pemahaman terhadap tugas pokok masing-masing jabatan dan tingkat pemahaman terhadap fungsi masing-masing jabatan. Tingkat pemahaman terhadap tugas pokok di sini yaitu terkait gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan tersebut, sedangkan tingkat pemahaman terhadap fungsi disini hal yang harus diperhatikan adalah pemahaman terhadap *Job Description* dan pemahaman terhadap pemisahan tugas dari masing-masing jabatan.

Berdasarkan cara pengukuran yang telah diuraikan di atas, variabel persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Wahyuningsih (2016). Indikator yang digunakan adalah tingkat pemahaman terhadap tugas pokok masing-masing jabatan dan tingkat pemahaman terhadap fungsi masing-masing jabatan.

2.2.5. Komitmen Manajemen Puncak

2.2.5.1. Pengertian Komitmen Manajemen

Sheth dan Mittal (2004) mendefinisikan komitmen sebagai hasrat atau keinginan kuat untuk mempertahankan dan melanjutkan relasi yang dipandang penting dan bernilai jangka panjang. Komitmen biasanya tercermin dalam perilaku kooperatif dan tindakan aktif untuk tetap mempertahankan relasi yang telah terbina.

Menurut Cherirington dalam Khikmah (2005) komitmen manajemen atau komitmen organisasi sebagai nilai personal, yang kadang-kadang mengacu sebagai sikap loyal pada perusahaan. Selanjutnya Sinaga dan Siregar (2009) yang berpendapat bahwa komitmen organisasi atau komitmen manajemen adalah suatu keadaan dimana anggota organisasi tersebut mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap organisasi tersebut.

Pendapat lain disampaikan oleh Robbins dalam Ohorella (2013:14) mengemukakan komitmen organisasi merupakan salah satu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak suka terhadap organisasi tempat bekerja. Manajemen merupakan bagian dari organisasi, hal ini berarti bahwa komitmen manajemen ialah sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan

tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat individu betah dan tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan kelangsungan organisasi.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen manajemen puncak adalah sikap seseorang pimpinan yang loyal, mempunyai keinginan kuat serta bersedia untuk mengerahkan semua usahanya guna mencapai tujuan dan kelangsungan suatu organisasi. Dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa organisasi dengan komitmen manajemen puncak yang kuat dari pimpinan akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

2.2.5.2. Komponen Komitmen Manajemen

Mowday & Porter dalam Setiawati & Zulkaida (2007) mengemukakan bahwa komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen yakni; (1) penerimaan dan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi, (2) kesediaan individu untuk berusaha dengan sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi, dan (3) keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi tersebut.

Meyer & Smith dalam Setiawati & Zulkaida (2007) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi terdiri dari 3 komponen yaitu komitmen kerja afektif, komitmen kerja kontinuans, dan komitmen kerja normatif. Komitmen kerja afektif (*affective occupational commitment*), yaitu komitmen sebagai keterikatan afektif/psikologis karyawan terhadap pekerjaannya. Komitmen ini menyebabkan

karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka menginginkannya. Komitmen kerja kontinuans (*continuance occupational commitment*), mengarah pada perhitungan untung-rugi dalam diri karyawan sehubungan dengan keinginannya untuk tetap mempertahankan atau meninggalkan pekerjaannya. Komitmen ini menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka membutuhkannya. Komitmen kerja normatif (*normative occupational commitment*), yaitu komitmen sebagai kewajiban untuk bertahan dalam pekerjaan. Komitmen ini menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka merasa wajib untuk melakukannya serta didasari pada adanya keyakinan tentang apa yang benar dan berkaitan dngan masalah moral.

2.2.5.3.Indikator Komitmen Manajemen Puncak

Komitmen manajemen puncak sebagai hasrat atau keinginan kuat untuk mempertahankan dan melanjutkan visi, misi, dan kegiatan yang dipandang penting dan bernilai jangka panjang bagi organisasi (Sheth & Mittal: 2004). Menurut Aranya & Ferris dalam Pasaribu (2008), komitmen pimpinan puncak dapat diukur dari upaya dalam mengarahkan, mempengaruhi dan mendorong bawahannya kearah berbagai tujuan dalam organisasi.

Menurut Mursyid (2011) terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan indikator dalam variabel komitmen manajemen yaitu: 1) kebanggaan organisasi; 2) ketidakmauan untuk bekerja keras demi kepentingan organisasi; 3) kebanggaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan organisasi; 4) perasaan senang memberikan hasil yang bermanfaat bagi organisasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Allen & Meyer dalam Modo, Sintike., Saerang, David dan

Modo Agus (2016) yang menyebutkan bahwa komitmen organisasi dapat diukur melalui: 1) *Affective Commitment*; 2) *Continuence Commitment*; dan 3) *Normatif Commitment*.

Berdasarkan cara pengukuran yang telah diuraikan di atas, pengukuran komitmen pimpinan puncak pada penelitian ini mengacu dari Aranya & Ferris dalam Pasaribu (2008). Adapun cara pengukuran (indikator) yang dipakai adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya dalam mengarahkan bawahannya kearah berbagai tujuan dalam organisasi
- 2) Upaya dalam mempengaruhi bawahannya kearah berbagai tujuan dalam organisasi
- 3) Upaya dalam mendorong bawahannya kearah berbagai tujuan dalam organisasi

Peneliti menggunakan indikator yang mengacu dari Aranya & Ferris dalam Pasaribu (2008) untuk mengukur komitmen pimpinan puncak dikarenakan terdapat tiga indikator yang tepat digunakan untuk menggambarkan komitmen manajemen puncak secara sederhana dan sering digunakan untuk mengukur komitmen manajemen puncak.

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Laeli Zuhriyah (2016)	Pengaruh Bimbingan Teknis, Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Desa, dan Persepsi Pemahaman Tugas Pokok	Pemahaman mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
		dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen)	Bimbingan teknis tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan.
2.	Putri Wahyuningsih (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Persepsi Pamong Desa di Kabupaten Kebumen)	Bimbingan teknis, pemahaman mekanisme perencanaan, dan Persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kebumen.
3.	Ria Rahmawati (2016)	Persepsi Pamong Desa Tentang Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kebumen	Bimbingan teknis, pemahaman mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan desa, dan persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kebumen.
4.	Ibnu Wardana (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang)	Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Magelang.
5.	Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto (2015)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)	Pemerintah Desa Ketindan telah membuktikan komitmennya atau tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Malang. Dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan selain itu ditemukan program saat perencanaan tidak tercantum

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
			<p>dalam RPD namun dalam realisasi keuangannya tercantum. Perihal tersebut diharapkan pemerintah Desa Ketindan untuk memperhatikan terkait pengklasifikasian program sehingga tidak terulang permasalahan tersebut.</p>
6.	Ade Irma (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	<p>Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.</p>
7.	Ayu Komang Dewi Lestari, Anantawikrama Tungga Atmadja, I Made Pradana Adiputra (2014)	Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Intepretatif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh Krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan, 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo), 3) Dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, Pengurus Desa Pakraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen</p>

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
			akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman.
8.	Peggy Sande (2013)	Pengaruh Penyajian laporan keuangan desa dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan desa berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Begitupula dengan variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
9.	Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012)	Pengaruh Penyajian laporan keuangan desa Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan desa daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial.
10.	Paulus Israwan Setyoko (2010)	Akuntabilitas Administrasi Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	Kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal dan horizontal administrasi keuangan ADD menunjukkan pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa belum berhasil. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Oleh karenanya, untuk meningkatkan keberhasilan program ADD, maupun program pembangunan perdesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
11.	Nurkhamid, M (2008)	Implementasi Inovasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, pelatihan, serta budaya organisasi terbukti berpengaruh secara positif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja dan penggunaan informasi kinerja.

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah bimbingan teknis (X_1), penyajian laporan keuangan desa (X_2), persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa (X_3), dan komitmen manajemen puncak (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa

Teori pendidikan dan pelatihan menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha terencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan *skill*, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi.

Bimbingan teknis (bimtek) merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu (Marbun, 2009). Bimbingan teknis merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna menciptakan

sumber daya manusia yang berkompeten sebagai pengelola keuangan desa. Bimbingan teknis akan mengoptimalkan kinerja pengelola keuangan desa karena akan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2.4.2. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Teori *stewardship* sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), memandang manajemen sebagai *steward* (pelayan/ penerima amanah/ pengelola) akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Implikasinya dalam variabel ini yaitu pemerintah desa bertindak sebagai *steward*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah desa.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian laporan pemerintah daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (Mulyana, 2006). Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan pada gilirannya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan 2006: 7). Penyajian laporan keuangan desa merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan

informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009: 159).

Dalam penelitian Bandariy (2011) yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Peggy (2013) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut PP No.71 Tahun 2010, penyajian laporan keuangan dapat diukur melalui pengukuran berupa relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.4.3. Pengaruh Persepsi Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam teori kompetensi dikatakan bahwa sumber daya manusia menjadi bagian terpenting dari pencapaian tujuan suatu organisasi. Aparat desa memiliki tugas yang amat penting selaku organ negara. Tugas akan berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia yang ada memiliki kompetensi yang menunjang secara profesional. Diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, aparatur desa dapat bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki serta paham akan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah desa

sehingga mampu bekerja dengan optimal dan terarah sesuai dengan tugasnya guna pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Kompetensi didefinisikan oleh Spencer dalam Sudarmanto (2009: 46) sebagai karakter dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa dan aparat pengelola keuangan desa memiliki *job description* yang berbeda-beda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa diharapkan pengelola keuangan desa akan lebih bertanggungjawab akan tugasnya serta tidak akan terjadi tumpang tindih tugas atau gesekan pekerjaan sehingga akan tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2.4.4. Pengaruh Komitmen Manajemen Puncak Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam teori *stewardship* dikatakan bahwa manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama serta manajer cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi dibandingkan mementingkan tujuannya sendiri. Komitmen merupakan komponen yang penting dalam profil secara psikologis mengenai *steward*.

Yang bertindak sebagai manajemen puncak dalam konteks pemerintah desa yakni kepala desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 sampai dengan pasal 7 menyebutkan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah

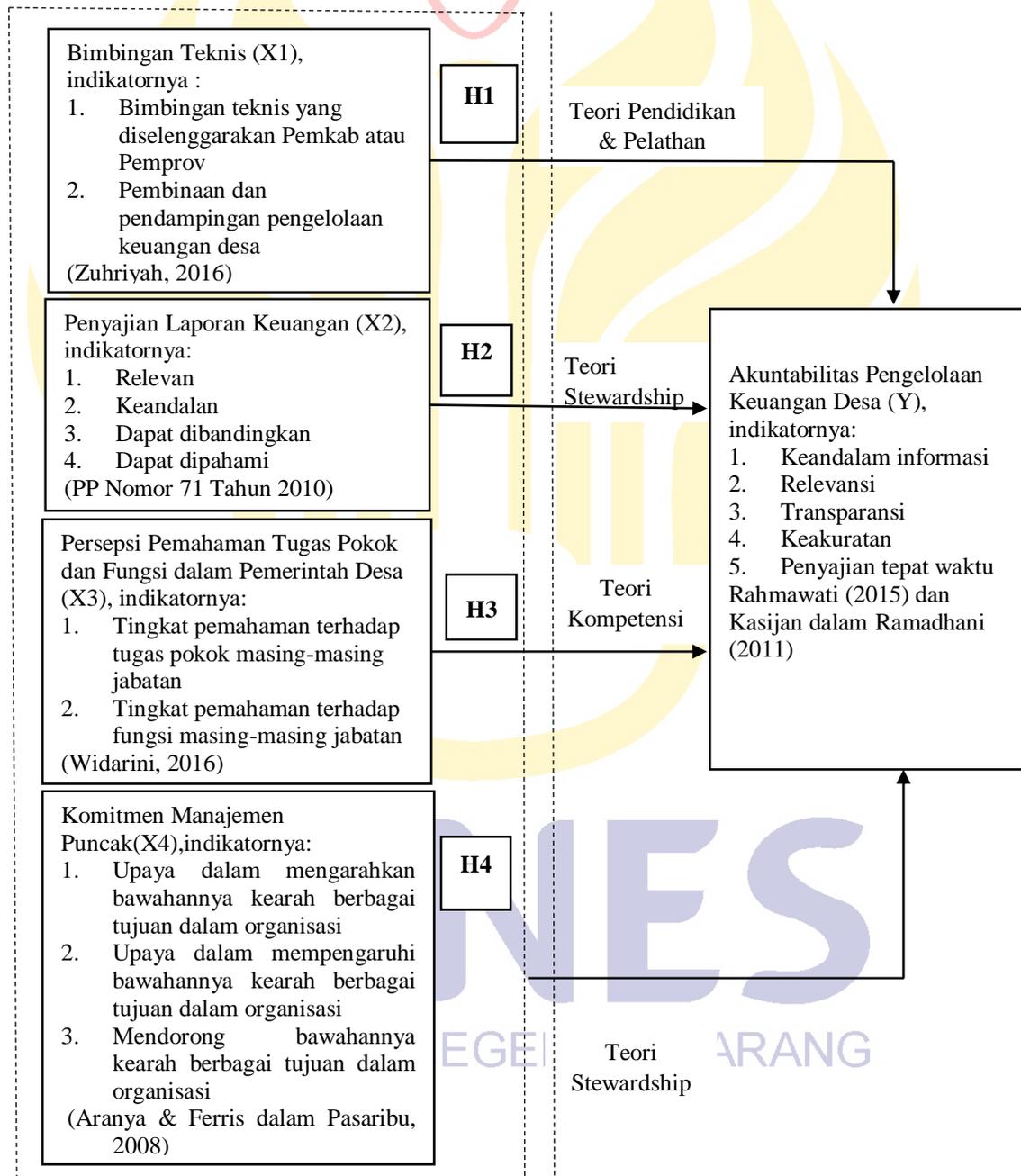
desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dengan komitmen yang dimiliki maka manajemen puncak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa akan lebih memaksimalkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi yang dibantu oleh para aparat desa. Sehingga kepala desa akan mengerahkan seluruh usaha dan pikirannya untuk mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan semestinya guna mewujudkan akuntabilitas keuangan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mempersoalkan komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung jawab, dengan demikian, ukuran komitmen manajemen puncak yang dalam hal ini adalah pimpinan pemerintahan desa adalah terkait dengan pendelegasian wewenang (*empowerment*). Dalam konsep ini pimpinan dihadapkan pada komitmen untuk mempercayakan tugas dan tanggung jawab ke bawahan. Sebaliknya, bawahan perlu memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri.

Shields (1995) menyatakan bahwa komitmen manajemen puncak dapat dicerminkan dengan mengalokasikan sumber daya, tujuan, dan strategi pada berbagai rencana yang dianggap bernilai; menolak sumberdaya yang menghambat inovasi; dan memberikan dukungan politis yang diperlukan untuk memotivasi atau menekan para individu atau pihak lain yang menolak keberadaan inovasi. Komitmen manajemen puncak terkait pengelolaan keuangan desa merupakan unsur penting yang menunjang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena dengan

komitmen yang kuat maka kepala desa selaku manajemen puncak dalam pengelola akan keuangan desa akan lebih optimal dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan : ————— : Pengaruh secara parsial

----- : Pengaruh secara simultan

2.5. Hipotesis Penelitian

Ha1: Bimbingan Teknis Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Ha2: Penyajian Laporan Keuangan Desa Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Ha3: Persepsi Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Pemerintah Desa Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Ha4: Komitmen Manajemen Puncak Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Penyajian laporan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Komitmen manajemen puncak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian, maka saran dan sumbangan pemikiran penulis berikut, diharapkan dapat bermanfaat baik instansi maupun pihak-pihak lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk memaksimalkan bimbingan teknis yang diselenggarakannya. Tidak hanya dari segi kuantitas (banyaknya bimbingan teknis yang diselenggarakan) tetapi juga ditingkatkan kualitasnya, salah satunya yaitu pelaksanaan simulasi materi.

2. Desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung masih belum semua menggunakan *website* untuk memaparkan hasil kinerja dalam pengelolaan keuangan desa. Alangkah lebih baik apabila pemerintah desa membuat *website* agar masyarakat pengguna laporan keuangan lebih mudah mengakses laporan keuangan desa.
3. Desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung sebaiknya membuat paparan uraian tugas pokok dan fungsi seluruh jabatan, supaya aparat desa selalu mengingat dan memahami tugas pokok dan fungsi jabatannya dengan lebih baik lagi.
4. Kepala desa di Kecamatan Mayong dan Kecamatan Kedung menjaga serta meningkatkan komitmen manajemen yang dimilikinya dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan pencapaian tujuan organisasi.
5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian, seperti tingkat pendidikan. Penelitian juga dapat dikembangkan juga dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, W., Rahmawati, V., dan Al Azhar, A. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Dumai). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Dalam Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol. 8, No. 2, Halaman 97-189
- Bandariy, Himmah. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Dale, M. 2003. *Developing Management Skill (Terjemahan)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Detik.com. 2016. *Tujuh Orang 'Korupsi' Dana Desa Diringkus Tim Saber Pungli Polda Jatim* (diakses dari <https://news.detik.com/jawatimur/3364250/tujuh-orang-korupsi-dana-desa-diringkus-tim-saber-pungli-polda-jatim>) pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 08.45 WIB
- Eks. Fasilitator Keuangan PNPM-MPD. 2015. *Kesiapan dan Penyiapan Pengelolaan Keuangan Desa (Dalam Kerangka Undang-undang No. 6 Tahun 2014)*. Jawa Timur.
- EM, Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*. Cet. 3, Semarang: Difa Publishers
- Ensiklopedi Kementerian Keuangan. *Tugas Pokok dan Fungsi*. 2014. (Diakses dari <http://www.wikiapbn.org/tugas-pokok-dan-fungsi/>) pada tanggal 21 Maret 2017 Pukul 09.22 WIB

- GAO. 2001. *Managing For Results: Federal Managers' Views on Key Management Issues Vary Widely Across Agencies*. MD: General Accounting Office, Gaithersburg, GAO
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Mitra Pelajar.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia-KSAP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan*.
- Ikhsan, Arfan dan Herkulanus Bambang Suprpto. 2008. *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Irma, Ade. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Jurnal Pembangunan Wilayah Pedesaan. Palu: Universitas Tadulako.
- Ismail, Muhammad., Widagdo, Ari Kuncara dan Widodo Agus. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Volume XIX No. 2 Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Kasijan, 2009. Perbedaan Persepsi antar Stakeholders terhadap Dukungan Pejabat dalam Penerapan SAP, Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Empiris di Kabupaten Kulon Progo). *Tesis*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Koranmuria. 2015. *Dana Desa Untuk 4 Desa di Jepara Terancam Hangus* (diakses dari <http://www.koranmuria.com/2015/11/30/23680/dana-desa-untuk-4-desa-di-jepara-terancam-hangus.html>) pada tanggal 20 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB
- Khikmah. 2005. *Pengertian Komitmen Organisasi*. <http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/03/pengertian-komitmen-organisasi.html?m=1> (Diakses 21 Maret 2017 pukul 22.19)

- Khusniyatun, Siti. 2016. *Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Semarang.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta. LAN dan BPKP.
- Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: *Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa*. 2015.
- Lestari, A., Atmadja, A & Adiputra I. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali*. *e-Journal Jurusan Akuntansi*, Volume 2 No. 1. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik NonPemerintahan)*. Skripsi. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Marbun, Lamria Rauli. 2009. *Gambaran Sistem Pelayanan pada Unit Diklat Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre Jakarta Tahun 2014*. Skripsi. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Modo, Sintike., Saerang, David dan Modo, Agus. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud)*.
- Moekijat. 1981. *Latihan dan Pengembangan Pegawai*. Penerbit Alumni. Bandung
- Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Mulyono, S, P. 2014. *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

- Mursyid, Raisyah. 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Kabupaten Bogor). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. Pengaruh Penyajian Neraca SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Medan
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurkhamid, M. 2008. *Implementasi Inovasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 3(1): 45 – 76.
- Ohorella, Rizki Wahyu Utami. 2013. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai*. Universitas Hasanuddin
- Pasaribu, Hiras. 2008. *Pengaruh Komitmen, Persepsi, dan Penerapan Pilar Dasar Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial pada BUMN Manufaktur Di Indonesia*. *Accounting Workshop*. UPN Veteran Yogyakarta.
- Peggy, Sande. 2013. Pengaruh Penyajian laporan keuangan desa Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa
- Raharjo, Eko. 2007. *Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*. *Jurnal* Vol. 2 No.1. Semarang: STIE Pelita Nusantara Semarang.

- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Yogyakarta : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Rahmawati, Ria. 2016. Persepsi Pamong Desa terhadap Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi . Universitas Negeri Semarang.
- Rahmi, Fajri., Setyowati, Endah dan Siswidiyanto. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya: Malang.
- Ramadhani. 2011. Persepsi Stakeholders Internal Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Universitas Sebelas Maret Pasca Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum (Studi Kasus Pada Laporan Keuangan Tahun 2009). *Skripsi*. Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Rivani, Alfanita. S. 2012. “Analisis *Job Description* pada Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”. *Tesis*. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Setiawati, Devi & Zulkaida, Anita. 2007. *Perbedaan Komitmen Kerja Berdasarkan Orientasi Peran Gender Pada Karyawan Di Bidang Kerja Non Tradisional*. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Vol. 2 ISSN : 1858 – 2559.
- Setyoko, Paulus Irawan. 2010. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Sheth, Jagdish dan Banwari Mittal. 2004. *Customer Behaviour: Managerial Perspective*. Second Edition. Singapore: Thomson.
- Shields, M. 1995. *An Empirical Analysis of Firm Implementation Experiences With Activity-Based Costing*. Journal of Management Accounting Research, 7, 1 – 28
- Sinaga, Ekha Yunora dan Narumorang Siregar. 2009. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Perkebunan Nusantara III SEI Sikambing Medan*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Sumatera Utara
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan

- Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumiarti. 2015. “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*”. Dalam *e-Journal Katalogis*, Volume 3 Nomor 2 Halaman 135 – 142 ISSN 230-2019. Palu: Universitas tadulako.
- Suranto, Aw. 2010. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Susilowati, Hani Khotijah. 2010. *Efektivitas Proses Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Studi Kasus Provinsi DIY)*. FISIP. Universitas Indonesia.
- Toha, Suherman. 2007. *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Tribunnews.com. 2017. *KPK Sebut Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Buruk*. (diakses dari <http://m.tribunnews.com/nasional/2017/08/04/kpk-sebut-laporan-pertanggungjawaban-dana-desa-buruk>) pada 4 Agustus 2017 pukul 13.35 WIB
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian laporan keuangan desa Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Wahyudin, Agus. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan*. Semarang: Unnes Press.
- Wahyuni, Putu dkk. 2014. *Pengaruh Penyajian laporan keuangan desa Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung)*. Volume 2 No. 1. Jurusan Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Wahyuningsih, Putri. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Persepsi Pamong Desa di Kabupaten Kebumen). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

Wardana, Ibnu. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi . Universitas Negeri Semarang.

Widarini, Nina. 2016. Pemahaman Pamong Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan di Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

WWW.Kedesa.id (diakses pada tanggal 20 Maret 2017 Pukul 08.45 WIB)

Young. 2010. *Definisi Persepsi*. (online), <http://id.shvoong.com/social/sciences/psychology/18/03/2010/definispersepsen.html/#ixzzWDRrNai>. (diakses tanggal 21 Maret pukul 20.15 WIB)

Yulaelawati, Ella, 2007. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Pakar Raya.

Zuhriyah, Laely . 2016. Pengaruh Bimbingan Teknis, Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Pemerintah Desa dalam Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.